

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Surabaya dengan meninjaunya dari sisi wajib pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data sekunder (*time series*) dengan kurun waktu tahun 1989 sampai dengan tahun 2003. Sumber data didapatkan dari BPS, Bank Indonesia, Laporan Tahunan Pajak Ditjen Pajak Kanwil XI Jawa Bagian Timur I, dan Departemen Keuangan. Data yang digunakan adalah data tahunan dengan 15 tahun pengamatan ($n = 15$). Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu jumlah wajib pajak penghasilan orang pribadi dan tingkat pendapatan perkapita, serta 1 variabel terikat yaitu penerimaan pajak penghasilan di Kota Surabaya. Teknik analisis data dilakukan dengan metode statistik yaitu analisis regresi linier berganda.

Hasil perhitungan uji regresi menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan di Kota Surabaya dipengaruhi secara bersama-sama oleh 2 variabel bebas. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung (172,264) > nilai F tabel (3,89). Kemampuan kedua variabel bebas dalam menjelaskan variabel tergantung sangat tinggi, terlihat dari koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,966. Ini berarti 96,6% proporsi variabel tergantung dapat dijelaskan oleh variabel bebas, sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Koefisien korelasi parsial (r^2) masing-masing variabel bebas X_1 (JWPOP) dan X_2 (PP) adalah sebesar 0,294 dan 0,713. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan perkapita mempunyai pengaruh dominan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kota Surabaya.

Berdasarkan uji t, terlihat variabel jumlah wajib pajak penghasilan orang pribadi (JWPOP) dan tingkat pendapatan perkapita (PP) signifikan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan di Kota Surabaya. Sedangkan konstanta PPh bernilai negatif, hal ini terjadi karena variabel jumlah wajib pajak penghasilan orang pribadi (JWPOP) dan tingkat pendapatan perkapita (PP) memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan PPh di Kota Surabaya, ada sebagian jumlah wajib pajak penghasilan orang pribadi yang memiliki penghasilan di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), serta kepemilikan NPWP oleh wajib pajak PPh OP hanya untuk keperluan birokrasi saja bukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.